



# RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA TAHUN 2025

DPMPTSP KOTA BALIKPAPAN



DPMTPSP KOTA BALIKPAPAN  
Jalan Ruhui Rahayu I No.9, Balikpapan

## KATA PENGANTAR

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi landasan hukum dalam menetapkan perencanaan pembangunan nasional yang sistematis dan berkesinambungan, sebagai implementasi undang-undang tersebut hingga diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, di Kota Balikpapan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2021-2026.

Dengan ditetapkannya peraturan daerah tersebut di atas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Balikpapan sebagai Perangkat Daerah yang diberi pelimpahan sebagian kewenangan perizinan bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan teknis pelayanan perizinan dan melaksanakan pengoordinasian pelayanan beberapa jenis perizinan dan non perizinan pada satu tempat maupun satu pintu serta melakukan promosi dan pengembangan investasi di daerah, telah menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RK-PD) sebagai Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) setiap tahun.

Penyusunan Renja Tahun 2025 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dengan dokumen perencanaan strategis yang telah ditetapkan, mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode tahun sebelumnya, untuk memecahkan masalah yang dihadapi dan berdasarkan usulan program serta kegiatan yang menjadi prioritas (terutama berasal dari masyarakat) dengan harapan dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan akuntabilitas perencanaan kinerja DPMPT Kota Balikpapan sebagai salah satu upaya untuk memantapkan manajemen pemerintahan dan pembangunan yang akuntabel demi terwujudnya *Good Government* dan *Clean Governance*.

Balikpapan, 12 Juli 2024  
Kepala DPMPTSP Kota Balikpapan



# DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar</b>	.....	i
<b>Daftar Isi</b>	.....	ii
<b>Daftar Tabel</b>	.....	iii
<b>Bab I Pendahuluan</b>	.....	1
1.1 Latar Belakang	.....	1
1.2 Landasan Hukum	.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan	.....	4
1.4 Sistematika Penulisan	.....	5
<b>Bab II Hasil Evaluasi Rencana Kerja DPMPTSP Kota Balikpapan Tahun 2024</b>	.....	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja DPMPTSP Tahun 2024	.....	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kota Balikpapan	.....	25
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	.....	27
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	.....	31
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	.....	39
<b>Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan</b>	.....	40
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	.....	40
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja DPMPTSP	.....	43
3.3 Program dan Kegiatan	.....	47
<b>Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan DPMPTSP Kota Balikpapan</b>	.....	65
<b>Bab V Inovasi Perangkat Daerah</b>	.....	71
<b>Bab VI Penutup</b>	.....	72

## DAFTAR TABEL

Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja sampai dengan tahun 2023.....	14
Tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kota Balikpapan.....	26
Tabel T-C.31 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025 DPMPTSP Kota Balikpapan.....	32
Tabel T-C.32 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kota Balikpapan.....	39
Tabel 3.1 Telaahan Misi BKPM dan DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur Terhadap Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu .....	42
Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Renstra DPMPTSP Kota Balikpapan Tahun 2025 .....	45
Tabel T-C.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026.....	50

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen perencanaan yang dibuat oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan Pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. RENJA Perangkat Daerah adalah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Secara teknis, penyusunan RENJA SKPD mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

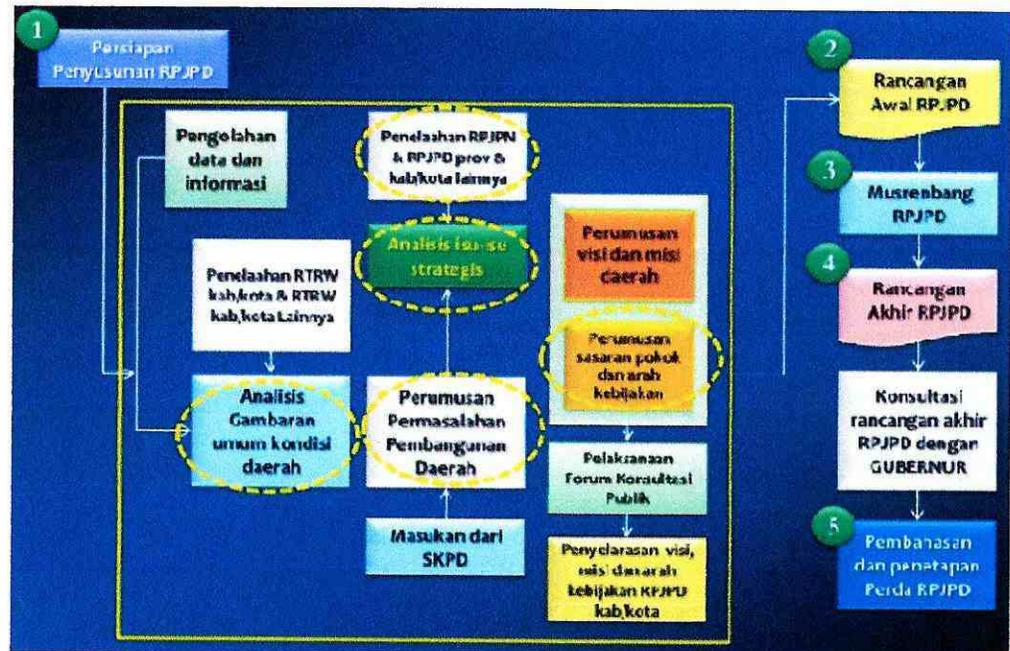
Sebagai dokumen rencana tahunan, Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Balikpapan mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program Pemerintah Kota Balikpapan mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. RENJA PD merupakan dokumen yang secara substansial penjabaran dari visi, misi dan program PD seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) PD dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Balikpapan.
  2. RENJA PD merupakan acuan bagi PD untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam KUA – PPAS dan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.
-

- RENJA PD merupakan salah satu instrument evaluasi pelaksanaan program/kegiatan PD untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja PD.

Gambar 1.1

Tahapan dan Tatacara Penyusunan RPJPD Kabupaten/Kota



Mengingat arti strategis Rancangan Akhir RENJA PD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kota Balikpapan, maka sejak awal penyusunan hingga penetapan dokumen RENJA DPMPSTP Tahun 2024 mengikuti tata cara dan alur penyusunan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah antara lain:

- Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RENJA tahun sebelumnya dan mengacu pada RKPD tahun berjalan;
- Program dan Kegiatan dalam RENJA harus sesuai dengan Program Prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026;

3. Program dan Kegiatan dalam RENJA harus selaras dengan program dan kegiatan yang telah disepakati dalam Forum Musrenbang Kota Balikpapan;
4. Program dan Kegiatan dalam RENJA dilengkapi dengan indikator hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dari Program, Kegiatan hingga Sub Kegiatan dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju tahun selanjutnya.

## **1.2 Landasan Hukum**

Peraturan perundang-undangan yang mendasari dan menjadi referensi dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 DPMPTSP Kota Balikpapan adalah :

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
11. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2021-2026;
13. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (DPMPT);
14. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan Tahun 2021-2026

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan Tahun 2025 adalah sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan program serta kegiatan DPMPTSP dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang mengacu pada Rencana Kerja Tahun 2024 dan berpedoman pada Renstra DPMPTSP Tahun 2021-2026.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja DPMPTSP Kota Balikpapan Tahun 2025 ini adalah untuk menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Berdasarkan Peraturan Peraturan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri No.86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah DPMPTSP Kota Balikpapan Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II . HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

#### **BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD
- 3.3 Program dan Kegiatan

#### **BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **BAB V. INOVASI PERANGKAT DAERAH**

#### **BAB VI. PENUTUP**

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENCANA KERJA**

### **DPMPTSP KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja DPMPTSP Tahun 2024**

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan sub urusan pemerintahan bidang pelayanan satu pintu yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, meliputi sub urusan pengembangan, promosi, pelayanan, pengendalian, data dan sistem informasi penanaman modal serta pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 2024, DPMPTSP Kota Balikpapan menjalankan 6 (enam) Program, 10 (sepuluh) Kegiatan dan 23 (dua puluh tiga) Sub Kegiatan dalam rangka pencapaian target, tujuan dan sasaran dinas pada tahun berjalan sesuai Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP tahun 2021-2026. Rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dapat dirincikan sebagai berikut :

#### **I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

##### **1. Kegiatan Administrasi Keuangan**

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

##### **2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
-

d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

e. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu

f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

**3. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

a. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

**4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

**5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

**II. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**

**1. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota**

a. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

b. Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota

**III. Program Promosi Penanaman Modal**

**1. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**

a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

**IV. Program Pelayanan Penanaman Modal**

---

**1. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
- b. Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
- c. Sub kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan

**V. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**

**1. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
- c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

**VI. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**

**1. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**

- a. Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektroni

Pagu Anggaran DPMPTSP Kota Balikpapan Tahun 2023 (murni) sebesar **Rp 17.064.300.000,-** (Tujuh Belas Miliar Enam Puluh Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah). Dan berdasarkan dokumen APBD-P Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan dalam Perda Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

---

Tahun Anggaran 2023 tanggal 11 Oktober 2023 Perwali Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 tanggal 13 Oktober 2023, Pagu Anggaran Perubahan DMPTSP Kota Balikpapan menjadi sebesar **Rp 25.064.300.000,-** (Dua Puluh Lima Miliar Enam Puluh Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah). Perubahan dilakukan pada dana kegiatan – kegiatan yang dianggap prioritas untuk dilakukan penambahan.

Program dan Kegiatan DMPTSP Kota Balikpapan yang mengalami perubahan setelah terbitnya Peraturan Daerah (Perda) Kota Balikpapan Tahun 2023 tentang Perubahan APBD Tahun 2023, adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dari Rp 199.927.000 menjadi Rp 5.199.927.000
  2. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dari Rp 470.000.000 menjadi Rp 726.660.000
  3. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dari Rp 0 menjadi Rp 452.010.000
  4. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dari Rp 550.000.000 menjadi Rp 580.000.000
  5. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dari Rp 350.000.000 menjadi Rp 504.330.000
  6. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dari Rp 250.000.000 menjadi Rp 350.000.000
  7. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota dari Rp 2.500.000.000 menjadi Rp 4.101.000.000
  8. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dari Rp 154.300.000 menjadi Rp 560.300.000
  9. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal dari Rp 344.300.000 menjadi Rp 0
  10. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal mendapatkan tambahan pagu dari dana DAK Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal dari BKPM RI dengan pagu semula Rp 110.448.000 menjadi Rp 405.436.000
-

11. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal mendapatkan tambahan pagu dari dana DAK Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal dari BKPM RI dengan pagu semula Rp 120.512.000 menjadi Rp 169.824.000

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Organisasi Perangkat

Daerah (OPD) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan s/d Tahun 2023, berdasarkan mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran strategis dan indikator kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa indikator masukan, keluaran (output) dan hasil (outcome). Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup:

1. Kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kegiatan;
2. Tingkat pencapaian sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan dan indikator makro yang berhubungan dengan sasaran tersebut

Secara umum program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun anggaran 2023 telah mencapai target yang telah direncanakan dengan level capaian target dalam rentang 80 - 100 % dengan level capaian antara tinggi hingga sangat tinggi. Tahun 2023 Realisasi Pekerjaan Fisik sebesar **89,30** % dengan Realisasi Keuangan DPMPSTP sebesar **89,48** % (level capaian dalam kategori Baik) . Terdapat beberapa sub kegiatan yang tidak memenuhi target Keuangan namun tercapai realisasi fisiknya seperti:

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Tingkat capaian realisasi kegiatan sebesar 100% dan penyerapan anggaran hanya sebesar 95,04%. Terdapat SILPA positif (Penghematan)

2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Tingkat capaian realisasi kegiatan sebesar 100% dan penyerapan anggaran hanya sebesar 95%. Terdapat SILPA positif (Penghematan)

3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Tingkat capaian realisasi kegiatan sebesar 100% dan penyerapan anggaran hanya sebesar 89,16%. Terdapat SILPA positif (Penghematan)

4. Fasilitasi Kunjungan Tamu

Tingkat capaian realisasi kegiatan sebesar 100% dan penyerapan anggaran hanya sebesar 90,06%. Terdapat SILPA positif (Penghematan)

5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Tingkat capaian realisasi kegiatan sebesar 104% dan penyerapan anggaran hanya sebesar 96,72%. Terdapat SILPA positif (Penghematan)

6. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Tingkat capaian realisasi kegiatan sebesar 100% dan penyerapan anggaran hanya sebesar 80,42%. Terdapat SILPA positif (Penghematan)

7. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tingkat capaian realisasi kegiatan sebesar 100% dan penyerapan anggaran hanya sebesar 93,37%. Terdapat SILPA positif (Penghematan)

8. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Tingkat capaian realisasi kegiatan sebesar 100% dan penyerapan anggaran hanya sebesar 97,41%. Terdapat SILPA positif (Penghematan)

9. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Tingkat capaian realisasi kegiatan sebesar 100% dan penyerapan anggaran hanya sebesar 56,24%. Terdapat SILPA positif (Penghematan)

10. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

Tingkat capaian realisasi kegiatan sebesar 100% dan penyerapan anggaran hanya sebesar 89,26%. Terdapat SILPA positif (Penghematan)

11. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota

Tingkat capaian realisasi kegiatan sebesar 100% dan penyerapan anggaran hanya sebesar 99,07%. Terdapat SILPA positif (Penghematan)

12. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

Tingkat capaian realisasi kegiatan sebesar 100% dan penyerapan anggaran hanya sebesar 87,66%. Terdapat SILPA positif (Penghematan)

13. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Tingkat capaian realisasi kegiatan sebesar 221% dan penyerapan anggaran hanya sebesar 92,21%. Terdapat SILPA positif (Penghematan)

14. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal

Tingkat capaian realisasi kegiatan sebesar 130% dan penyerapan anggaran hanya sebesar 88,02%. Terdapat SILPA positif (Penghematan)

15. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan

Tingkat capaian realisasi kegiatan sebesar 144% dan penyerapan anggaran hanya sebesar 97,21%. Terdapat SILPA positif (Penghematan)

16. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal

Tingkat capaian realisasi kegiatan sebesar 101% dan penyerapan anggaran hanya sebesar 92,56%. Terdapat SILPA, karena terdapat paket sosialisasi Pengawasan Penanaman Modal dengan sumber dana DAK Non Fisik yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Fitur Sub Sistem Pengawasan di OSS belum berjalan.

17. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

Tingkat capaian realisasi kegiatan sebesar 225% dan penyerapan anggaran hanya sebesar 94,26%. Terdapat SILPA, karena terdapat paket sosialisasi Pengawasan Penanaman Modal dengan sumber dana DAK Non Fisik yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Fitur Sub Sistem Pengawasan di OSS belum berjalan.

18. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Tingkat capaian realisasi kegiatan sebesar 100% dan penyerapan anggaran hanya sebesar 97,66%. Terdapat SILPA positif (Penghematan)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel 2 pada Rencana Kerja ini.

**Tabel T-C.29**  
**Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota**  
**Renja Perangkat Daerah DPMPPTSP Kota Balikpapan**  
**Periode Pelaksanaan Triwulan IV Tahun 2023**

1.	Presentase Pencapaian Nilai realisasi investasi	100%
2.	Nilai Reformasi Birokrasi Pada DPMPPTSP Kota Balikpapan	0.11%
3.	Presentase Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat	34.13

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Penjelasan
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	7		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		17
I	Meningkatnya Capaian Nilai Realisasi Investasi	Program Promosi Penanaman Modal	Persentas Minat Investasi dalam Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah	%	85	4,101,000,000	85	3,594,843,635	100%	87.66%	Tingkat capaian tercapai 100% karena terdapat peningkatan minat investasi dalam kegiatan Promosi Penanaman Modal di Kota Balikpapan yang ditandai oleh beberapa audensi penajajakan peluang investasi dari Singapore dan China
		Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Kenaikan Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal	%	5	4,101,000,000	5	3,594,843,635	100%	87.66%	Tingkat capaian tercapai 100% karena kegiatan promosi dilaksanakan secara maksimal baik yang menggunakan dana PAD maupun Non PAD
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dokumen	5	4,101,000,000	5	3,594,843,635	100%	87.66%	Tingkat capaian kinerja tercapai 100% sesuai target (Triwulan II : telah dilaksanakan event promosi Penghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah di Jakarta , Triwulan III : telah dilaksanakan event promosi APEKSI Expo di Kota Makassar, Untuk Triwulan IV telah mengikuti 3 event promosi dalam daerah di Kota Balikpapan (Nusakraf, ALKI II Zone Investment Expo, One on One Meeting sebagai rangkaian acara pada ALKI II)

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Penjelasan
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	7		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		17
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Pelaku Usaha yang Mendapat Manfaat Insentif Bidang Penanaman Modal	%	5	167,500,000	0	156,864,000	0%	93.65 %	Telah dilakukan pembahasan Raperda Insentif oleh Dewan dan menunggu pembahasan dan sinkronisasi dengan OPD Terkait
		Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Peta Potensi yang Diterbitkan	%	20	167,500,000	20	156,864,000	100%	93.65 %	Dokumen Peta Potensi telah selesai pengembangannya pada tahun 2023 dan akan dilakukan berkelanjutan tahun 2024
		Sub kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	92,500,000	1	82,564,000	100%	89.26 %	Capaian kinerja telah tercapai 100%
		Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Dokumen	1	75,000,000	1	74,300,000	100%	99.07 %	Capaian kinerja telah tercapai 100%

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Penjelasan
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	7		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya Capaian Nilai Realisasi Investasi	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Perusahaan (debottlenecking) yang Difasilitasi Permasalahan Penanaman Modalnya (%)	%	100	575,260,000	100	375,271,174	100%	65.24 %	Fasilitasi permasalahan perusahaan dengan jumlah investasi yang besar (debottlenecking) bekerjasama dengan BKPM/Kementerian Investasi, dan sampai saat ini sudah masuk periode penyampaian LKPM Triwulan 4 Tahun 2023 (1 - 10 Januari 2024)
		Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyampaian LKPM (LKPM)	LKPM	315	575,260,000	5614	375,271,174	111%	65.24 %	Capaian kinerja telah tercapai 1782 %. Data LKPM sampai pelaporan Tw 4 Tahun 2023 (penyampaian LKPM tgl 1 - 10 Januari 2024) Catatan : Data Proyeksi diolah dari Data DPMPSTSP Provinsi Kaltim untuk Capaian LKPM tahun 2023 sejumlah 5614 LKPM
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal (PAD) (Kegiatan Usaha)	Kegiatan Usaha	4	-	0	-	0%	0%	Telah dilakukan Pergeseran anggaran dan anggaran Pemantauan telah didistribusikan ke sub kegiatan sesuai Juknis DAK Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal (Pembinaan dan Pengawasan)
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal (PAD) (Pelaku Usaha)	Pelaku Usaha	100	405,436,000	100	375,271,174	100%	92.56 %	Capaian kinerja telah tercapai 100 %, telah dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Kemudahan Berusaha pada tgl 7 September 2023, pendampingan pengisian LKPM Online secara online (via zoom dan via no WA konsultasi LKPM Dalak PM) dan secara offline (loket pelayanan LKPM, pembinaan langsung ke Perusahaan).

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Penjelasan
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	7		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		17
			Jumlah Kegiatan Usaha bagi Pelaku Usaha yang mendapatkan Fasilitas Penyelesaian permasalahan dan Hambatan Pelaku Usaha (DAK NF FPM) (Kegiatan Usaha)	Kegiatan Usaha	9		9		100%		Capaian kinerja telah tercapai 100 %, telah dilaksanakan kegiatan Fasilitas Penyelesaian permasalahan dan Hambatan Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya
			Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Bimbingan Teknis Pelaku Usaha (DAK NF FPM) (Pelaku Usaha)	Pelaku Usaha	251		260		103.59%		Capaian kinerja telah tercapai 103,59 %. Telah dilaksanakan kegiatan Bimtek Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Bimtek Implementasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebanyak 2 kegiatan, pada tgl 9 & 10 Agustus 2023 dan 23 & 24 Agustus 2023
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan (PAD) (Kegiatan Usaha)	Kegiatan Usaha	6	169,824,000	15	160,069,800	250%	94.26%	Capaian kinerja telah tercapai 250 %. Telah dilaksanakan kegiatan Pengawasan OSS RBA untuk 15 kegiatan usaha.
			Jumlah Kegiatan Usaha bagi Pelaku Usaha yang memperoleh Pengawasan Penanaman Modal (DAK NF FPM) (Kegiatan Usaha)	Kegiatan Usaha	16		32		200%		Capaian kinerja telah tercapai 200 %. Telah dilaksanakan kegiatan Pengawasan OSS RBA untuk 32 kegiatan usaha.

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Penjelasan
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	7		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		17
	Meningkat nya Capaian Nilai Realisasi Investasi	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Berlaku Efektif	%	85	374,320,000	94.4 4	365,557,325	111.1 1%	98%	Data Capaian dihitung berdasarkan data hitung dari penerbitan izin via oss.go.id
		Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Jumlah Permintaan Data dan informasi yang Terpenuhi	%	100	374,320,000	100	365,557,325	100%	98%	Rasio data capaian mencapai 100%
		Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Doku men	1	374,320,000	1	365,557,325	100%	98%	Capaian kinerja telah tercapai 100%

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Penjelasan
					7	12=8+9+10+11	13=12/7X100%				
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	17
II	Meningkatnya Kualitas Layanan Perizinan	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	%	68	751,939,000	96.63	698,923,717	142%	93%	Data Capaian dihitung berdasarkan data hitung dari penerbitan izin via oss.go.id dan non OSS
		Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan	Dokumen	11596	751,939,000	17,794	698,923,717	153%	93%	Data berdasarkan hasil input dari Koordinator PTSP I dan II
		Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pelaku Usaha	1,500	560,300,000	3,309	516,628,605	221%	92%	Data berdasarkan hasil input dari Koordinator PTSP I dan II
		Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kegiatan Usaha	96	43,550,000	125	38,334,262	130%	88%	Data berdasarkan hasil input dari Koordinator PTSP I dan II
		Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Orang	10,000	148,089,000	14,360	143,960,850	144%	97%	Capaian Kinerja melebihi 100% (Diambil dari angka jumlah pengunjung di loket DPMPPTSP dan Bidang, Konsultasi via CS, SiJempol dan Pengaduan via SPAN LAPOR)

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Penjelasan
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	7		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		17
III	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	IKM Internal Perangkat Daerah	Skor	79	19,094,281,000	92.77	16,711,927,517	117.43%	87.52%	Capaian kinerja telah tercapai lebih dari 100%
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Skor	77.5	8,875,431,000	96.74	7,519,020,779	125%	84.72%	Capaian kinerja telah tercapai lebih dari 100%	
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	60	8,875,431,000	45	7,519,020,779	75%	84.72%	Sesuai update data pada aplikasi SimGAJI (sesuai update data sejumlah 45 orang PNS)	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah		IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Skor	77	6,605,789,000	96.25	6,525,433,286	125%	98.78%	Capaian kinerja telah tercapai lebih dari 100%	
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	39,993,000	1	38,008,000	100%	95%	Capaian kinerja telah tercapai 100%	
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	39	5,199,927,000	39	5,183,085,000	100%	100%	Capaian kinerja telah tercapai 100%	
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	536,625,000	3	509,785,700	100%	95.00%	Capaian kinerja telah tercapai 100%	
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	74,999,000	2	66,870,950	100%	89.16%	Capaian kinerja telah tercapai 100%	
Sub kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	1	27,585,000	1	24,842,500	100%	90.06%	Capaian kinerja telah tercapai 100%	
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	81	726,660,000	84	702,841,136	104%	96.72%	Capaian kinerja telah tercapai lebih dari 100%	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Penjelasan
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	7		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		17
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Skor	79	452,010,000	81.77	363,518,936	104%	80.42%	Capaian kinerja telah tercapai lebih dari 100%
		Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Unit	4	452,010,000	4	363,518,936	100%	80.42%	Capaian kinerja telah tercapai 100%
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Skor	79	2,306,721,000	95.48	2,223,726,24	120.86%	96.40%	Capaian kinerja telah tercapai lebih dari 100%
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	10,000,000	1	10,000,000	100%	100.00%	Capaian kinerja telah tercapai 100%
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	580,000,000	12	541,537,833	100%	93.37%	Capaian kinerja telah tercapai 100%
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	3	1,716,721,000	3	1,672,188,391	100%	97.41%	Capaian kinerja telah tercapai 100%

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Penjelasan
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	7		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		17
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Skor	77.5	854,330,000	94.79	43,747,228	122%	51.94%	Capaian kinerja telah tercapai lebih dari 100%
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	24	504,330,000	24	83,630,978	100%	56.24%	Capaian kinerja telah tercapai 100%
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	284	50,000,000	151	160,116,250	53%	45.75%	Pemeliharaan yang telah dilaksanakan adalah pemeliharaan Mesin Foto Copy, CCTV, Mesin absensi, Lift, AC, Komputer, Laptop, Printer, Instalasi Air dan Mesin Genset (Pemeliharaan belum maksimal disebabkan oleh kondisi Peralatan dan perlengkapan yang masih cukup baik
TOTAL						25,064,300,000		22,426,976,104			
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN									105.96%	81.73%	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN									Sangat Tinggi	Tinggi	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN									114.63%	77.22%	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN									Sangat Tinggi	Tinggi	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM									71.59%	87.45%	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM									Sedang	Tinggi	

**Berdasarkan tabel diatas dapat kita ketahui bahwa :**

**1. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan :**

- **Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal** dengan tingkat capaian kinerja 0% dan capaian keuangan 93,65% dengan target indikator program yaitu Presentase pelaku usaha yang mendapat manfaat insentif bidang penanaman modal dengan target kinerja sebesar 5% namun realisasi kinerja pada tahun 2023 belum tercapai (0%) karena belum tercapai karena telah dilakukan pembahasan Raperda Insentif oleh Dewan dan masih menunggu pembahasan dan sinkronisasi dengan OPD Terkait

**2. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan :**

- **Program Promosi Penanaman Modal** dengan tingkat capaian kinerja 100% dan capaian keuangan 87.66% dengan target indikator program yaitu Persentase minat investasi dalam kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah dengan target kinerja sebesar 85% dan terealisasi sebesar 85% sehingga realisasi kinerja tercapai sebesar 100% karena terdapat peningkatan minat investasi dalam kegiatan Promosi Penanaman Modal di Kota Balikpapan yang ditandai oleh beberapa audensi peninjauan peluang investasi dari Singapore dan China
- **Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal** dengan tingkat capaian kinerja 100% dan capaian keuangan 65,24% dengan target indikator program yaitu Persentase Perusahaan (debottlenecking) yang Difasilitasi Permasalahan Penanaman Modalnya dengan target kinerja sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% sehingga realisasi kinerja tercapai sebesar 100% karena Fasilitasi permasalahan perusahaan dengan jumlah investasi yang besar (debottlenecking) bekerjasama dengan BKPM/Kementerian Investasi.

**3. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan :**

- **Program Pelayanan Penanaman Modal** dengan tingkat capaian kinerja 142% dan capaian keuangan 93% dengan target indikator program yaitu Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan dengan target kinerja sebesar 68% dan terealisasi sebesar 96,63% sehingga realisasi kinerja tercapai sebesar 142% dengan jumlah penerbitan sejumlah 17.794 dokumen jika dibandingkan dengan target jumlah penerbitan Perizinan sebesar 11.596 dokumen
- **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** dengan tingkat capaian kinerja 117,43% dan capaian keuangan 87,52% dengan target indikator program yaitu IKM Internal Perangkat Daerah dengan target kinerja Skor IKM sebesar 79,00 dan terealisasi sebesar 92,77 sehingga realisasi kinerja tercapai sebesar 117,43% dengan hasil responden pengisian kuesioner IKM terhadap pelayanan dinas yang diberikan oleh petugas tercapai cukup baik.

**4. Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target**

- Masih terdapatnya ketidaksesuaian indikator keluaran antara dokumen Renja dan APBD (DPA/RKA)
- Masih terdapatnya beda satuan pada indikator dalam perencanaan di dokumen Renja dan APBD (DPA/RKA)
- Terdapat jenis target yang tidak terealisasi;
- Program, kegiatan dan Sub Kegiatan tidak seluruhnya terakomodir dalam APBD;
- Target output yang rendah pada saat penyusunan Renstra dan tidak melakukan analisa terhadap rencana dan realisasi pada tahun-tahun sebelumnya;
- Perumusan indikator dan metode perhitungan yang kurang tepat mempengaruhi pencapaian target dikarenakan kesulitan untuk melakukan perhitungan

**5. Kebijakan / Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut**

- Melakukan reviu serta penelaahan indikator kinerja program, kegiatan, Sub Kegiatan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis yang akan datang;
- Menentukan target secara realistis dan berdasar sesuai dengan rumusan perhitungan pencapaian targetnya;
- Memiliki data dasar pada setiap indikator kinerja sehingga dapat terukur dan dipertanggung jawabkan;
- Dalam setiap penyusunan dokumen perencanaan mempertimbangkan dan menganalisa hasil capaian pada tahun-tahun sebelumnya;
- Komitmen bersama seluruh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja.

**2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DPMPSTSP Kota Balikpapan**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan merupakan instansi teknis dan tidak memiliki SPM, sehingga capaian kinerjanya merupakan capaian terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) atau Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan tupoksinya. Sehubungan dengan terbitnya Surat Edaran nomor : 060.4/01799/Org tentang Penyusunan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 dalam menyusun Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 dimana tidak lagi menggunakan indeks RB sebagai IKU, namun menggunakan Nilai SAKIP Perangkat Daerah sebagai IKU dan menyesuaikan target dengan realisasi dari Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kota Balikpapan. Sesuai dengan .Adapun capaian kinerja DPMPSTSP Kota Balikpapan periode yang lalu digambarkan pada tabel T-C .30 di bawah ini :

Tabel T-C.30

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Balikpapan**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian / PROYEKSI				Catatan Analisis
			Tahun n-2 2022	Tahun n-1 2023	Tahun n 2024	Tahun n+1 2025	Tahun n-2 2022	Tahun n-1 2023	Tahun n 2024	Tahun n+1 2025	
1	Meningkatnya Capaian Nilai Realisasi Investasi	Presentase Pencapaian Nilai Realisasi Investasi	100%	100%	100%	100%	463,26%	156,39%	Sesuai Target Renstra	Target dan Realisasi IKU pada tahun 2021 tidak dapat diinput karena perbedaan indikator dengan Renstra yang baru	
2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP DPMPTSP Kota Balikpapan	77,57	75	75,5	76	-	98,55%			
3	Meningkatnya Kualitas Layanan Perizinan	Presentase peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	4278%	1827%			

Berdasarkan tabel tersebut di atas, capaian kinerja DPMPTSP Kota Balikpapan secara keseluruhan tercapai melebihi target yang telah ditetapkan.

- **Indikator I “Presentase Pencapaian Nilai Realisasi Investasi”**, dengan realisasi sebesar **156,39 %** dari target 100% sehingga capaian indikator I sebesar **156,39 %** dengan kriteria penilaian realisasi kinerja sangat tinggi
- **Indikator II “Nilai SAKIP DPMPTSP Kota Balikpapan”** , dengan realisasi sebesar 73,91 dari target 75 sehingga capaian sebesar **98,55%** dengan kriteria penilaian realisasi kinerja sangat tinggi
- **Indikator III “Presentase peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat”** , dengan realisasi sebesar 2,01 dari target 0,11 sehingga capaian sebesar **1827%** dengan kriteria penilaian realisasi kinerja sangat tinggi.

Dengan demikian maka secara umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan telah melaksanakan tugas dan fungsi dalam urusan penanaman modal secara baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan tahun 2021-2026.

## **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD**

### **a. Tingkat Pelayanan DPMPTSP**

Secara umum kualitas penyelenggaraan pelayanan DPMPTSP kota Balikpapan terus menerus mengalami peningkatan, beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan tersebut meliputi :

1. Isu strategis yang dihadapi oleh DPMPTSP Kota Balikpapan pada tahun 2024 adalah terbentuknya Mal Pelayanan Publik Kota Balikpapan yang telah diresmikan secara nasional pada tanggal 5 Desember 2022 sebagai pengembangan yang lebih progresif memadukan pelayanan dari pemerintah pusat, daerah, BUMD dan swasta dan pada pengembangannya akan di *upgrade* menjadi Mal Pelayanan Publik Digital;
2. Pelayanan Pendampingan OSS (Online Single Submission), Antusiasme masyarakat untuk mendaftarkan perusahaan melalui OSS, maka diperlukan pendampingan secara intensif untuk melakukan proses registrasi dan pengajuan perizinan usaha serta pengajuan perijinan lainnya yang termasuk di dalam layanan perijinan berusaha menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 (Jumlah Izin yang melalui OSS DPMPTSP Kota Balikpapan adalah sebanyak 33 Jenis Izin dari total 80 Jenis Izin yang dilayani oleh DPMPTSP Kota Balikpapan);
3. Mempermudah pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani oleh DPMPTSP Kota Balikpapan melalui beberapa inovasi pelayanan yaitu : SiJempol (Sistem Jemput Bola), Reklame Prioritas, dan sebagainya;

4. Melakukan sosialisasi pelayanan perizinan melalui media cetak, media elektronik dan media sosial serta melaksanakan kegiatan sosialisasi langsung kepada stakeholder terkait;
5. Penyederhanaan proses perizinan;
6. Memfasilitasi investor apabila ada permasalahan dengan masyarakat;
7. Beberapa pelayanan perizinan hanya dilakukan satu pintu DPMPTSP sehingga masyarakat lebih mudah untuk melakukan pengurusan;
8. Meningkatkan investasi disektor pariwisata dengan kegiatan promosi/pameran baik yang dilaksanakan pada event skala regional maupun event berskala nasional;
9. Meningkatkan sasaran penyelenggaraan promosi investasi dan sosialisasi investasi di Kota Balikpapan.

**b. Permasalahan dan hambatan Berdasarkan Tugas dan Fungsi DPMPTSP**

Peningkatan penyelenggaraan pelayanan DPMPTSP Kota Balikpapan tersebut, dalam pelaksanaannya masih banyak dijumpai berbagai permasalahan yang menghambat kinerja pelayanan DPMPTSP Kota Balikpapan antara lain :

1. Masih terdapat beberapa Peraturan Menteri yang belum menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Izin Berusaha Terintegrasi secara elektronik (OSS);
2. Kurangnya koordinasi dan komunikasi dengan kementerian terkait perizinan sehingga jika terjadi masalah teknis perijinan tidak mendapat jawaban yang pasti;
3. Belum terbaharuinya beberapa Peraturan Daerah yang menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan pelayanan perizinan sehingga sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan tuntutan kebutuhan masyarakat dan zaman;
4. Kurangnya sosialisasi peraturan yang berkaitan tentang perizinan;

5. Belum optimalnya pengawasan dan penertiban terhadap pelaku usaha yang belum memiliki izin atau izin yang sudah kadaluarsa;
6. Sarana dan prasarana yang belum memadai sehingga pelaksanaan tugas sehari-hari tidak maksimal;
7. Sumber daya manusia yang terbatas dan belum sesuai dengan kebutuhan organisasi yang memberikan pelayanan perizinan;
8. Perlunya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat bagi sumber daya manusia di DPMPTSP melalui pelatihan-pelatihan, kursus-kursus serta diklat fungsional;
9. Belum terkininya atau terbaharuinya Standard Operational Procedure (SOP), Standar Pelayanan Perizinan pada DPMPTSP dan dokumen Pedoman Pelayanan DPMPTSP sebagai acuan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat;
10. Sengketa Kepemilikan tanah sehingga menjadi kendala pada saat pembahasan Izin Prinsip dan IMTN;
11. RTRW dan RDTR yang belum baku sehingga menjadi kendala pada saat pembahasan perizinan seperti izin prinsip, IMB dan sebagainya.

**c. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPMPTSP Kota Balikpapan**

Disamping permasalahan yang telah disebutkan pada poin b diatas, DPMPTSP memiliki peluang besar untuk meningkatkan pelayanan publik dalam hal meningkatkan pertumbuhan Investasi di Kota Balikpapan. Dengan terus menggiatkan inovasi, DPMPTSP memiliki dinamika tantangan dan peluang sebagai berikut :

- **Pengembangan aplikasi SICANTI**K (Sistem Informasi Cerdas Pelayanan Terpadu Untuk Publik) bekerjasama dengan Diskominfo Kota Balikpapan dengan tujuan untuk mempermudah proses penyampaian informasi pelayanan dan tranparansi biaya pengurusan izin.
- **Tracking Barcode dalam SICANTI**K (Sistem Informasi Cerdas Pelayanan Terpadu Untuk Publik) sehingga *tracking* proses

perizinan dapat diketahui langsung oleh pemohon dengan mudah, cepat dan transparan.

- **SPONTAN (Sistem Pendaftaran Online tanpa antrian)**

Inovasi SPONTAN aplikasi untuk pemenuhan komitmen dimasa pandemic. Pengajuan dan penerbitan izin bisa didownload langsung via email pemohon.

- **SIBER (sistem Antar Izin Terbit)**

Inovasi SIBER (sistem antar izin terbit) yang dibuat untuk izin yang tidak terbit sesuai SOP dan bekerjasama dengan Ojek Online untuk pengantaran berkasnya.

- **SiJEMPOL (Sistem Jemput Bola Langsung)**

Merupakan Inovasi yang dirilis bulan Februari 2018, dimana Petugas Perijinan DPMPTSP langsung terjun ke lapangan untuk melakukan pelayanan perijinan baik perijinan usaha, IMB dan Perijinan lainnya di lokasi yang telah ditetapkan sehingga memperdekat jarak antara masyarakat yang ingin mengurus izin.

- **Simpananku Kopi**

Merupakan layanan Memudahkan difabel dan manula dalam mengajukan perizinan berusaha dimasa pandemic.izin bisa dijemput dan diantar.

- **Mimbari Online**

Merupakan layanan untuk mempermudah pengurusan IMB rumah ibadah lebih cepat dan mudah terbit tanpa retribusi

- Kualitas SDM DPMPTSP yang handal dan memadai sehingga mampu melaksanakan tugas-tugas yang diberikan;
- Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran dan teknologi yang memadai;

Tersedianya peraturan yang mendukung kegiatan Perizinan dan Penanaman Modal baik secara pengendalian dan pengawasan beserta evaluasinya.

#### **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Berdasarkan Rancangan awal RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja, serta pagu indikatif Perangkat Daerah, maka analisis kebutuhan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan Tahun 2025, adalah sebagaimana tabel berikut:



Tabel T-C.31

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025 DPMPSTSP Kota Balikpapan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Pelaku Usaha yang mendapat Manfaat Insentif Bidang Penanaman Modal	%	DPMPSTSP	5	575,000,000	APBD	5	775,018,000
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Peta Potensi yang Diterbitkan	%	DPMPSTSP	20	575,000,000	APBD	20	375,018,000
2.18.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten.kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah	Dokumen	DPMPSTSP	1	200,000,000	APBD	1	175,000,000
2.18.02.2.02.04	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dokumen	DPMPSTSP	1	375,000,000	APBD	1	200,018,000
2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Minat Investasi dalam Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah	%	DPMPSTSP	95	3,137,340,471	APBD	100	800,000,000
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kenaikan Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal	%	DPMPSTSP	5	3,137,340,471	APBD	5	800,000,000
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dokumen	DPMPSTSP	6	3,137,340,471	APBD	6	800,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Perusahaan (Debottlenecking) yang di Fasilitas Pemasalahan Penanaman Modalnya	%	DPMPPTSP	100	295,248,000	APBD	100	984,150,000
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyampaian LKPM	LKPM	DPMPPTSP	345	295,248,000	APBD	360	984,150,000
2.18.05.2.01.04	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kegiatan Usaha	DPMPPTSP	4	110,248,000	APBD	4	5,000,000
2.18.05.2.01.05	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Pelaku Usaha	DPMPPTSP	150	85,000,000	APBD	200	450,000,000
2.18.05.2.01.06	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kegiatan Usaha	DPMPPTSP	14	100,000,000	APBD	15	529,150,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Presentase Pelayanan Perizinan dan Non perizinan yang diterbitkan	%	DPMPPTSP	70	1,699,994,614	APBD	71	2,214,337,500
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Penerbitan perizinan dan non perizinan (Dokumen)	Dokumen	DPMPPTSP	11610	1,699,994,614	APBD	11620	2,214,337,500
2.18.04.2.01.06	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	DPMPPTSP	1500	1,203,260,000	APBD	1500	1,200,000,000
2.18.04.2.01.07	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Orang	DPMPPTSP	10000	199,994,614	APBD	10000	614,337,500
2.18.04.2.01.08	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	Kegiatan Usaha	DPMPPTSP	110	296,740,000	APBD	120	400,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
2.18.06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Berlaku Efektif	%	DPMP TSP	87	478,000,000	APBD	88	1,291,696,000
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Jumlah Permintaan Data dan Informasi yang Terpenuhi	%	DPMP TSP	100	478,000,000	APBD	100	1,291,696,000
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokumen	DPMP TSP	1	478,000,000	APBD	1	1,291,696,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
2.18.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	IKM Internal Perangkat Daerah	Nilai	DPMPTSP	81	15,814,416,915	APBD	82	14,359,482,000
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai	DPMPTSP	77.8	142,574,475	APBD	78	75,000,000
2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	DPMPTSP	1	142,574,475	APBD	1	25,000,000
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai	DPMPTSP	80.5	9,807,133,965	APBD	81	9,986,482,000
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	DPMPTSP	60	9,807,133,965	APBD	60	9,986,482,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
<b>2.18.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat daerah</b>	<b>IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Nilai	DPMPTSP	80.5	1,573,415,336	APBD	81	1,398,000,000
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	DPMPTSP	1	60,000,000	APBD	1	70,000,000
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	DPMPTSP	13	84,885,925	APBD	13	350,000,000
2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	DPMPTSP	4	575,000,000	APBD	4	408,000,000
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	DPMPTSP	3	100,000,000	APBD	3	150,000,000
2.18.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	DPMPTSP	1	80,400,000	APBD	1	20,000,000
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	DPMPTSP	45	673,129,411	APBD	50	400,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
<b>2.18.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>DPMPTSP</b>	<b>77.5</b>	<b>249,600,000</b>	<b>APBD</b>	<b>79</b>	
2.18.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		DPMPTSP	2	249,600,000	APBD	-	
<b>2.18.01.2.08</b>	<b>Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan daerah</b>	<b>IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Nilai</b>	<b>DPMPTSP</b>	<b>81</b>	<b>2,653,441,500</b>	<b>APBD</b>	<b>82</b>	<b>1,910,000,000</b>
2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	DPMPTSP	1	10,000,000	APBD	1	10,000,000
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	DPMPTSP	4	650,000,000	APBD	4	900,000,000
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	DPMPTSP	3	1,993,441,500	APBD	3	1,000,000,000
<b>2.18.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Nilai</b>	<b>DPMPTSP</b>	<b>80</b>	<b>1,388,251,639</b>	<b>APBD</b>	<b>80.5</b>	<b>990,000,000</b>
2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	DPMPTSP	36	822,701,564	APBD	36	470,000,000
2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	DPMPTSP	8	200,484,080	APBD	8	320,000,000
2.18.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	DPMPT	1	365,065,995	APBD	1	200,000,000
<b>TOTAL</b>						<b>22,000,000,000</b>			<b>20,424,683,500</b>

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan gabungan antara usulan masyarakat dan rencana kerja pemerintah daerah setiap tahunnya yang disahkan melalui rapat paripurna oleh DPRD. Usulan dari masyarakat ditampung dalam wadah Musrenbang yang terlebih dahulu dimulai dari Musrenbang tingkat kelurahan sampai Musrenbang tingkat kota.

Hasil usulan Musrenbang digunakan sebagai bahan untuk menyusun rancangan renja Perangkat Daerah. Penyusunan rancangan renja dibahas dalam forum Perangkat Daerah. Untuk Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPTSP) tahun 2024 tidak terdapat usulan Musrenbang hal tersebut dikarenakan DPMPTSP berperan sebagai penunjang urusan pemerintahan di bidang Perizinan Terpadu Satu Pintu yang berhubungan langsung dengan masyarakat dunia usaha.

**Tabel T-C.32**

**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024  
Kota Balikpapan**

Nama Perangkat Daerah : DPMPTSP

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>NIHIL</b>					

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Dalam rangka mencapai tujuan bernegara dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 menggariskan Visi Indonesia tahun 2025 yaitu INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR yang pelaksanaannya dibagi ke dalam 4 (empat) tahap pembangunan jangka menengah. Pembangunan Tahun 2018 berada pada tahap jangka menengah yang ke-empat yang arahnya digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019 dengan visi MEWUJUDKAN INDONESIA YANG BERDAULAT, MAKMUR, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG.

Jika diselaraskan dengan Sembilan program Presiden yang terpilih yaitu yang disebut Nawa Cita, Program ini digagas untuk menunjukkan prioritas jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan, yaitu :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Searah dengan strategi pembangunan nasional, tema Rencana Kerja Pembangunan (RKP) 2018 adalah **“Memacu Investasi dan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan dan Pemerataan”**.

Maka dapat disusun hubungan antara Rancangan Prioritas Nasional dan Program Prioritas pada Rancangan Awal RKP Tahun 2025 sebagaimana disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Prioritas Nasional	Program Prioritas
<b>1. Pengembangan dunia usaha dan pariwisata</b>	1. Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata (dari 10)
	2. Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (dari 10)
	3. Pengembangan 3 Kawasan Industri (KI) (dari 14)
	4. Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja
	5. Peningkatan Ekspor Barang dan Jasa Bernilai Tambah Tinggi
	6. Reforma Agraria
	7. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (a.l Kebakaran Hutan)
	8. Percepatan Pembangunan Papua

Dalam Program Prioritas diatas dapat bahwa Program prioritas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kota Balikpapan terdapat pada Program Nasional ke-4 yaitu Pengembangan dunia usaha dan pariwisata. Sedangkan pada pada Program Prioritas pada rancangan awal RKP tahun 2024 termasuk pada program ke-11 yaitu perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja.

Tabel 3.1

**Telaahan Misi BKPM dan DPMPPTSP Provinsi Kalimantan Timur terhadap Renstra Dinas  
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra BKPM	Sasaran Jangka Menengah DPMPPTSP Provinsi Kalimantan Timur	Sasaran Jangka Menengah DPMPPTSP Kota Balikpapan
1	2	3	4
1	Meningkatnya realisasi penanaman modal	1 Teridentifikasinya dan Terinfokannya Potensi dan Peluang Investasi di Kalimantan Timur serta Terselenggaranya MoU 2 Terwujudnya Peningkatan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	1 Meningkatkan nilai realisasi investasi
2	Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha / penanam Modal	3 Tersusunnya Perencanaan Penanaman Modal dan Kebijakan yang Terintegrasi dan Implementatif di Kawasan Strategi Provinsi	2 Meningkatkan Kualitas Layanan Perizinan
3	Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani	4 Terwujudnya Pelayanan Perizinan yang Lebih Mudah dan Cepat 5 Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan	

Dari tabel diatas maka dapat dilihat keselarasan antara Misi DPMPPTSP Kota Balikpapan dengan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur dengan Misi Kementerian terkait yaitu Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja DPMPTSP**

Pendekatan Penyusunan RKP 2025 dilakukan dengan Perkuatan Pelaksanaan Kebijakan *Money Follow Priority Program*. Penguatan tersebut dilaksanakan dengan Pendekatan Holistik, Integratif, Tematik dan Spasial dengan memperhatikan pada :

- Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
- Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
- Pengawasan, Pengendalian Investasi dan Perizinan
- Kemudahan Pelayanan dan Percepatan Proses Perizinan
- Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan

Pendekatan Holistik Tematik berarti pendekatan yang menekankan pada pentingnya keseluruhan dengan terdapat kaitan antara bagian-bagiannya untuk mencapai tujuan utama. Jadi, pendekatan ini mengutamakan kegiatan-kegiatan yang mendukung prioritas DPMPTSP Kota Balikpapan, identifikasi program-program dan kegiatan sampai koordinasi antar bidang yang bertujuan untuk mencapai sasaran prioritas DPMPTSP Kota Balikpapan yang didukung oleh antar bidang.

Pendekatan integratif diartikan sebagai penyatuan berbagai aspek ke dalam satu keutuhan yang padu, atau dapat juga diartikan sebagai pendekatan yang menyatukan beberapa aspek ke dalam satu proses.

Jika dihubungkan dengan Penanaman Modal dan Perizinan terpadu, maka pendekatan integratif lebih mengarah pada kegiatan mengidentifikasi dan mengarahkan agar output dari kegiatan prioritas dapat saling terintegrasi dengan kegiatan prioritas antar bidang lainnya dalam mendukung meningkatnya Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu baik dari segi kemudahan pelayanan, kemudahan akses informasi dengan pemanfaatan teknologi informasi serta transparansi dalam hal biaya dan tracking berkas untuk mendukung peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan.

Penerapan dalam dokumen Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu, pendekatan indikatif dapat diaplikasikan dengan menggabungkan dan mengkombinasikan beberapa program dan kegiatan untuk mencapai satu sasaran strategis.

Sedangkan pendekatan spasial digunakan saat pembahasan usulan kegiatan dan sinkronisasi lokasi pembangunan untuk meningkatkan manfaat dan daya ungkit dari Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang dirasakan baik masyarakat kota Balikpapan pada umumnya maupun masyarakat dunia usaha pada khususnya.

Hubungan yang selaras antara Renja dan RENSTRA, maka tujuan dan sasaran Rencana kerja Tahun 2054 merupakan tujuan dan sasaran RENSTRA DPMPTSP Tahun 2021-2026 yaitu :

Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan dalam mendukung visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan periode 2021-2026 sebagai berikut

1. Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Daerah
2. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintahan

Sasaran Misi program kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan yang diselaraskan dengan rencana pembangunan Kota Balikpapan dan visi dan misi Walikota terpilih periode 2021-2026 terdiri dari tiga sasaran yaitu:

1. Meningkatnya Capaian Nilai Realisasi Investasi
2. Meningkatnya Kualitas Layanan Perizinan
3. Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada DPMPTSP Kota Balikpapan

Pendekatan Holistik, Integratif, Tematik dan Spasial dalam penyusunan Renja DPMPTSP Kota Balikpapan dapat terlihat dalam tabel berikut :

**Tabel 3.2**

Tujuan dan Sasaran Renstra DPMPSTSP Kota Balikpapan Tahun 2025

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Daerah	Meningkatnya Capaian Nilai Realisasi Investasi	Persentase Pencapaian nilai realisasi investasi	100%	<p><b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b></p> <p>Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>2. Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota</li> </ol> <p><b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b></p> <p>Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota</li> </ol> <p><b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b></p> <p>Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya</li> <li>2. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha</li> <li>3. Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal</li> </ol>

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA SASARAN	PROGRAM & KEGIATAN
2	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Layanan Perizinan	Persentase Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat	0,11%	<p><b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>  Kegiatan Pengelolaan data dan informasi Perizinan dan Non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/Kota</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik</li> </ol> <p><b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>  Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Pelayanan Perizinan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik</li> <li>2. Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</li> <li>3. Sub Kegiatan Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</li> </ol>

### **3.3 Program dan Kegiatan**

Sesuai tujuan dan sasaran Rancangan Akhir Rencana Kerja DPMPTSP Tahun 2025, Program dan Kegiatan tahun 2025 disusun berdasarkan :

- a. Prioritas Pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2025;
- b. Berkolerasi dan bersinergi dengan kebijakan Nasional;
- c. Peningkatan tugas pokok dan fungsi kelembagaan DPMPTSP

Adapun program / Kegiatan / Sub Kegiatan teknis secara keseluruhan yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan selama lima tahun mendatang dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta pencapaian sasaran strategis, maka program / Kegiatan / Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan dijabarkan sebagai berikut :

#### **I. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**

1. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
  - a. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
  - b. Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota

#### **II. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**

1. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

#### **III. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**

1. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya

- b. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha
- c. Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal

#### **IV. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**

- 1. Kegiatan Pengelolaan data dan informasi Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/Kota
  - a. Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

#### **V. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**

- 1. Kegiatan Pengelolaan data dan informasi Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/Kota
  - a. Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
  - b. Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
  - c. Sub Kegiatan Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

#### **VI. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

- 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah

- a. Penyediaan Komponen Instalasi
  - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - e. Fasilitasi Kunjungan Tamu
  - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    - a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  5. Kegiatan Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan daerah
    - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
    - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
    - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
    - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
    - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Berdasarkan data Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan maka terdapat jumlah program sejumlah 6 program, 11 kegiatan dan 25 Sub Kegiatan.

Tabel T-C.33

## Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Nama SKPD : Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP)

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
I	Bidang Penanaman Modal				6,185,583,085				6,976,526,000
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal			5%	575,000,000	APBD		5%	775,018,000
A	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			20%	-	APBD		20%	400,000,000
	1. Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan kemudahan Penanaman Modal	<b>Input</b> 1. SDM 2. Dana 3. Sarana Prasarana 4. Waktu <b>Output (Keluaran) :</b> Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal <b>Outcome (Hasil) :</b> Presentase Rancangan Peraturan Daerah (Jumlah Perda/Perwali) yang disahkan	Orang Rp Paket Bulan Dokumen persen	1 6 - 1 12 1 20%	-	APBD	1	200,000,000	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
<b>B</b>	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	<b>Presentase Dokumen Peta Potensi yang Diterbitkan</b>			<b>20%</b>	<b>575,000,000</b>	<b>APBD</b>		<b>20%</b>	<b>375,018,000</b>
	1. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah	<b>Input</b> 1. SDM 2. Dana 3. Sarana Prasarana 4. Waktu <b>Output (Keluaran) :</b> Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah <b>Outcome (Hasil) :</b> Presentase Dokumen Peta Potensi yang Diterbitkan	Orang Rp Paket Bulan  Dokumen  persen	0 6 200,000,000 1 12  0  20%	200,000,000	APBD		1	175,000,000
	2. Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	<b>Input</b> 1. SDM 2. Dana 3. Sarana Prasarana 4. Waktu <b>Output (Keluaran) :</b> Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota <b>Outcome (Hasil) :</b> Presentase Dokumen Peta Potensi yang Diterbitkan	Orang Rp Paket Bulan  Dokumen  persen	1 6 375.000.000 1 12  1  20%	375.000.000	APBD		1	200,018,000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
II	<b>Program Promosi Penanaman Modal</b>			<b>95%</b>	<b>3,137,340,471</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>1,096,987,000</b>
A	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>5%</b>	<b>3,137,340,471</b>	<b>APBD</b>		<b>5%</b>	<b>1,096,987,000</b>
	1. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	<b>Input :</b> 1. SDM 2. Dana 3. Sarana Prasarana 4. Waktu  <b>Output (Keluaran) :</b> Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota  <b>Outcome (Hasil) :</b> Presentase Kenaikan Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal	Orang Rp event bulan  Dokumen  Persen	6 6 3,137,340,471 5 12  6  5%	3,137,340,471	APBD	6	800,000,000	
III	<b>Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</b>			<b>100%</b>	<b>295,248,000</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>984,150,000</b>
A	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>345 LKPM</b>	<b>295,248,000</b>	<b>APBD</b>		<b>360 LKPM</b>	<b>984,150,000</b>
	1. Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	<b>Input :</b> 1. SDM 2. Dana 3. Sarana Prasarana 4. Waktu  <b>Output (Keluaran) :</b> Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya  <b>Outcome (Hasil) :</b> Jumlah Penyampaian LKPM	Orang Rp Paket Bulan  Kegiatan Usaha  LKPM	4 6 110,248,000 1 12  4  345	110,248,000	APBD	4	5,000,000	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja
	2. Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	<b>Input :</b> 1. SDM 2. Dana 3. Sarana Prasarana 4. Waktu <b>Output (Keluaran) :</b> Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko <b>Outcome (Hasil) :</b> Jumlah Penyampaian LKPM	Orang Rp Paket Bulan Pelaku Usaha LKPM	150 6 85,000,000 1 12 150 345	85,000,000	APBD	200	450,000,000
	3. Pengawasan Penanaman Modal	<b>Input</b> 1. SDM 2. Dana 3. Sarana Prasarana 4. Waktu <b>Output (Keluaran) :</b> Jumlah Kegiatan dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha <b>Outcome (Hasil) :</b> Jumlah Penyampaian LKPM	Orang Rp Paket Bulan Kegiatan Usaha LKPM	14 6 100,000,000 1 12 14 345	100,000,000	APBD	15	529,150,000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
IV	Program Pelayanan Penanaman Modal			70	1,699,994,614	APBD		71	2,828,675,000
A	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			11610	1,699,994,614	APBD		11620	2,828,675,000
	1. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	<b>Input :</b> 1. SDM 2. Dana 3. Sarana Prasarana 4. Waktu  <b>Output (Keluaran) :</b>  Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik  <b>Outcome (Hasil) :</b>  Jumlah Pelayanan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan (Dokumen)	Orang Rp Paket Bulan  Pelaku Usaha  Dokumen	1500 21 1,203,260,000 1 12  1500  11610	1,203,260,000	APBD	1500	1,200,000,000	

No	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	2. Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	<b>Input :</b> 1. SDM 2. Dana 3. Sarana Prasarana 4. Waktu  <b>Output (Keluaran) :</b> Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha  <b>Outcome (Hasil) :</b> Jumlah Pelayanan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan (Dokumen)	Orang Rp. Paket bulan  Orang  Dokumen	10000 7 199,994,614 2 12  10000  11610	199,994,614	APBD		10000	614,337,500
	3. Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	<b>Input :</b> 1. SDM 2. Dana 3. Sarana Prasarana 4. Waktu  <b>Output (Keluaran) :</b> Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha  <b>Outcome (Hasil) :</b> Jumlah Pelayanan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan (Dokumen)	Orang Rp Paket Bulan  Unit usaha  Dokumen	110 40 296,740,000 1 12  110  11610	296,740,000	APBD		120	400,000,000

No	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
V	<b>Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal</b>			87	478,000,000	APBD		88	1,291,696,000
A	<b>Pengelolaan data dan informasi Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/Kota</b>			100	478,000,000	APBD		100	1,291,696,000
	1. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	<b>Input :</b> 1. SDM 2. Dana 3. Sarana Prasarana 4. Waktu  <b>Output (Keluaran) :</b>  Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan  <b>Outcome (Hasil) :</b> Rasio Jumlah Permintaan Data dan Informasi yang Terpenuhi	Orang Rp Paket Bulan  Dokumen  Persen	1 12 478,000,000 1 12  1  100	478,000,000	APBD	1	1,291,696,000	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
VI A	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>IKM Internal Perangkat Daerah</b>			<b>81</b>	<b>15,814,416,915</b>	<b>APBD</b>		<b>82</b>	<b>14,309,482,000</b>
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Nilai SAKIP</b>			<b>77.8</b>	<b>142,574,475</b>	<b>APBD</b>		<b>78</b>	<b>25,000,000</b>
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<b>Input :</b> 1. SDM 2. Dana 3. Sarana Prasarana 4. Waktu <b>Output (Keluaran) :</b> Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah <b>Outcome (Hasil) :</b> Nilai SAKIP	Orang Rp Paket Bulan Dokumen Nilai	1 12 142,574,475 1 12 1 77.8	142,574,475 APBD		1	25,000,000	
<b>B</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>80.5</b>	<b>9,807,133,965</b>	<b>APBD</b>		<b>81</b>	<b>9,986,482,000</b>
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	<b>Input :</b> 1. SDM 2. Dana 3. Sarana Prasarana 4. Waktu <b>Output (Keluaran) :</b> Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN <b>Outcome (Hasil) :</b> IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Orang Rp. Paket Bulan Orang/bulan Nilai	60 12 9,807,133,965 1 12 60 80.5	9,807,133,965 APBD		60	9,986,482,000	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
C	<b>Administrasi Umum Perangkat daerah</b>  1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<b>IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>  Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	<b>Input :</b>		<b>80.5</b>	<b>1,573,415,336</b>	<b>APBD</b>		<b>81</b>	<b>1,398,000,000</b>
			1. SDM	Orang	1	60,000,000	APBD		1	70,000,000
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2. Dana	Rp.	12					
			3. Sarana Prasarana	Paket	1					
			4. Waktu	Bulan	12					
			<b>Output (Keluaran) :</b>							
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1					
			<b>Outcome (Hasil) :</b>							
			IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai	0					
			<b>Input :</b>							
			1. SDM	Orang	13	84,885,925	APBD		13	350,000,000
			2. Dana	Rp.	12					
			3. Sarana Prasarana	Paket	1					
			4. Waktu	Bulan	12					
			<b>Output (Keluaran) :</b>							
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	13					
			<b>Outcome (Hasil) :</b>							
			IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai	80.5					

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja
	3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	<b>Input :</b> 1. SDM 2. Dana 3. Sarana Prasarana 4. Waktu <b>Output (Keluaran) :</b> Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan <b>Outcome (Hasil) :</b> IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Orang Rp. Paket Bulan	4 12 1 12	575,000,000	APBD		4 408,000,000
	4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	<b>Input :</b> 1. SDM 2. Dana 3. Sarana Prasarana 4. Waktu <b>Output (Keluaran) :</b> Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan <b>Outcome (Hasil) :</b> IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Orang Rp. Paket Bulan	3 12 1 12	100,000,000	APBD		3 150,000,000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	5. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	<b>Input :</b> 1. SDM 2. Dana 3. Sarana Prasarana 4. Waktu <b>Output (Keluaran):</b> Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu <b>Outcome (Hasil) :</b> IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Orang Rp. Paket Bulan Laporan Nilai	1 57 1 12 1 80.5	80,400,000	APBD		1	20,000,000
	6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<b>Input :</b> 1. SDM 2. Dana 3. Sarana Prasarana 4. Waktu <b>Output (Keluaran):</b> Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD <b>Outcome (Hasil) :</b> IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Orang Rp. Paket Bulan Laporan Nilai	45 57 1 12 45 80.5	673,129,411	APBD		50	400,000,000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
D	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			81	249,600,000	APBD		0	-
	1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<b>Input :</b> 1. SDM 2. Dana 3. Sarana Prasarana 4. Waktu <b>Output (Keluaran) :</b> Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan <b>Outcome (Hasil) :</b> IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Orang Rp. Jenis Bulan Unit Nilai	1 12 249,600,000 1 12 2 77,5	249,600,000	APBD		0	0

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
E	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>81</b>	<b>2,653,441,500</b>	<b>APBD</b>		<b>82</b>	<b>1,910,000,000</b>
	1. Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<b>Input :</b> 1. SDM 2. Dana 3. Sarana Prasarana 4. Waktu <b>Output (Keluaran) :</b> Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat <b>Outcome (Hasil) :</b> IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Orang Rp. Jenis Bulan Laporan Nilai	1 12 10,000,000 1 12 1 81	10,000,000 APBD		1	10,000,000	
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	<b>Input :</b> 1. SDM 2. Dana 3. Sarana Prasarana 4. Waktu <b>Output (Keluaran) :</b> Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan <b>Outcome (Hasil) :</b> IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Orang Rp. Paket Bulan Laporan Nilai	4 12 650,000,000 1 12 4 81	650,000,000 APBD		4	900,000,000	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja
	3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	<b>Input :</b> 1. SDM 2. Dana 3. Sarana Prasarana 4. Waktu <b>Output (Keluaran) :</b> Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan <b>Outcome (Hasil) :</b> IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Orang Rp. Paket Bulan Laporan Nilai	3 13 1,993,441,500 1 12 3 81	1,993,441,500	APBD		3 1,000,000,000
<b>F.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>80</b>	<b>1,388,251,639</b>	<b>APBD</b>		<b>80.5</b> <b>990,000,000</b>
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jabatan	<b>Input :</b> 1. SDM 2. Dana 3. Sarana Prasarana 4. Waktu <b>Output (Keluaran) :</b> Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya <b>Outcome (Hasil) :</b> IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Orang Rp. Paket Bulan Unit Nilai	36 12 822,701,564 2 12 36 80	822,701,564	APBD		36 470,000,000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	<b>Input :</b> 1. SDM 2. Dana 3. Sarana Prasarana 4. Waktu <b>Output (Keluaran) :</b> Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara <b>Outcome (Hasil) :</b> IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Orang Rp Paket Bulan Unit Nilai	8 12 365,065,995 1 12 8 80	365,065,995	APBD		8	320,000,000
	3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	<b>Input :</b> 1. SDM 2. Dana 3. Sarana Prasarana 4. Waktu <b>Output (Keluaran) :</b> Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi <b>Outcome (Hasil) :</b> IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Orang Rp Paket Bulan Unit Nilai	1 12 200,484,080 1 12 1 80	200,484,080	APBD		1	200,000,000
			<b>TOTAL</b>			<b>22,000,000,000</b>				<b>20,471,670,500</b>

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**  
**DPMPTSP KOTA BALIKPAPAN**

Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) disusun berdasarkan tabel sebagai berikut :

Nama OPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Kode  (1)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan  (2)	Rankhir Renja 2025					Catatan Penting  (8)
		Lokasi  (4)	Satuan	Target Capaian Kinerja  (5)	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif  (6)	Sumber Dana  (7)	
<b>2.18.02</b>	<b>Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal</b>	<b>DPMPTSP</b>	%	<b>5</b>	<b>575,000,000</b>	<b>APBD</b>	
<b>2.18.02.2.02</b>	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	<b>DPMPTSP</b>	%	<b>20</b>	<b>575,000,000</b>	<b>APBD</b>	
2..18.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Dokumen	0	200,000,000	APBD	
2.18.02.2.02.02	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Dokumen	1	375,000,000	APBD	
<b>2.18.03</b>	<b>Program Promosi Penanaman Modal</b>	<b>DPMPTSP</b>	%	<b>95</b>	<b>3,137,340,471</b>	<b>APBD</b>	
<b>2.18.03.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>DPMPTSP</b>	%	<b>5</b>	<b>3,137,340,471</b>	<b>APBD</b>	
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Dokumen	6	3,137,340,471	APBD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Rankhir Renja 2025					Catatan Penting
		Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)
<b>2.18.05</b>	<b>Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</b>	<b>DPMPTSP</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>295,248,000</b>	<b>APBD</b>	
<b>2.18.05.2.01</b>	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>DPMPTSP</b>	<b>LKPM</b>	<b>345</b>	<b>295,248,000</b>	<b>APBD</b>	
2.18.05.2.01.04	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	DPMPTSP	Kegiatan Usaha	4	110,248,000	APBD	
2.18.05.2.01.05	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	DPMPTSP	Pelaku Usaha	150	85,000,000	APBD	
2.18.05.2.01.06	Pengawasan Penanaman Modal	DPMPTSP	Kegiatan Usaha	14	100,000,000	APBD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Rankhir Renja 2025					Catatan Penting
		Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)
<b>2.18.04</b>	<b>Program Pelayanan Penanaman Modal</b>	<b>DPMPTSP</b>	<b>%</b>	<b>70</b>	<b>1,699,994,614</b>	<b>APBD</b>	
<b>2.18.04.2.01</b>	<b>Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>DPMPTSP</b>	<b>Dokumen</b>	<b>11610</b>	<b>1,699,994,614</b>	<b>APBD</b>	
2.18.04.2.01.06	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	DPMPTSP	Pelaku Usaha	1500	1,203,260,000	APBD	
2.18.04.2.01.07	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	DPMPTSP	Orang	10000	199,994,614	APBD	
2.18.04.2.01.08	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	DPMPTSP	Kegiatan Usaha	110	296,740,000	APBD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Rankhir Renja 2025					Catatan Penting
		Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)
<b>2.18.06</b>	<b>Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal</b>	<b>DPMPTSP</b>	<b>Nilai</b>	<b>87</b>	<b>478,000,000</b>	<b>APBD</b>	
<b>2.18.06.2.01</b>	<b>Pengelolaan data dan informasi Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/Kota</b>	<b>DPMPTSP</b>	<b>Nilai</b>	<b>100</b>	<b>478,000,000</b>	<b>APBD</b>	
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	DPMPTSP	Dokumen	1	478,000,000	APBD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Rankhir Renja 2025					Catatan Penting
		Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)
<b>2.18.01</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>DPMPTSP</b>	<b>Nilai</b>	<b>81</b>	<b>15,814,416,915</b>	<b>APBD</b>	
<b>2.18.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>DPMPTSP</b>	<b>Nilai</b>	<b>77.8</b>	<b>142,574,475</b>		
2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPMPTSP	Dokumen	1	142,574,475		
<b>2.18.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>DPMPTSP</b>	<b>Nilai</b>	<b>80.5</b>	<b>9,807,133,965</b>	<b>APBD</b>	
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPMPTSP	Orang/Bulan	60	9,807,133,965	APBD	
<b>2.18.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat daerah</b>	<b>DPMPTSP</b>	<b>Nilai</b>	<b>80.5</b>	<b>1,573,415,336</b>	<b>APBD</b>	
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPMPTSP	Paket	1	60,000,000	APBD	
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPMPTSP	Paket	13	84,885,925	APBD	
2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DPMPTSP	Paket	4	575,000,000	APBD	
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DPMPTSP	Paket	3	100,000,000	APBD	
2.18.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DPMPTSP	Laporan	1	80,400,000	APBD	
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPMPTSP	Laporan	45	673,129,411	APBD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Rankhir Renja 2025					Catatan Penting
		Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)
<b>2.18.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>DPMPTSP</b>	<b>Nilai</b>	<b>77.5</b>	<b>249,600,000</b>	<b>APBD</b>	
2.18.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DPMPTSP	Unit	2	249,600,000	APBD	
<b>2.18.01.2.08</b>	<b>Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan daerah</b>	<b>DPMPTSP</b>	<b>Nilai</b>	<b>81</b>	<b>2,653,441,500</b>	<b>APBD</b>	
2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPMPTSP	Laporan	1	10,000,000	APBD	
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPMPTSP	Laporan	4	650,000,000	APBD	
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPMPTSP	Laporan	3	1,993,441,500	APBD	
<b>2.18.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>DPMPTSP</b>	<b>Nilai</b>	<b>80</b>	<b>1,388,251,639</b>	<b>APBD</b>	
2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DPMPTSP	Unit	36	822,701,564	APBD	
2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPMPTSP	Unit	8	200,484,080	APBD	
2.18.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPMPTSP	Unit	1	365,065,995	APBD	
<b>TOTAL</b>					<b>22,000,000,000</b>		

## **BAB V**

### **INOVASI PERANGKAT DAERAH**

Menurut Peraturan Menteri PANRB No. 30 Tahun 2014, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemerintah Daerah saat ini dituntut untuk selalu melakukan inovasi dalam menyediakan pelayanan publik. Inovasi dimaksud sangat penting untuk menyikapi tuntutan pelayanan kepada masyarakat. Dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2025, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan sebagai salah satu pengampu kewenangan bidang perizinan di Kota Balikpapan mengajukan beberapa inovasi yang nantinya diharapkan dapat terus meningkatkan kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan. Inovasi tersebut antara lain adalah :

1. Pembangunan Digitalisasi Perizinan dan Aplikasi Manajemen Kinerja DPMPTSP
2. Penyelenggaraan ALKI II Zone Investment Forum #2 melalui Bussiness Matching dan Mini Expo
3. Sinkronisasi Peta Potensi Investasi daerah dengan Pusat
4. Identifikasi dan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal ke Kementerian terkait

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 merupakan implementasi dari perencanaan strategis yang ditetapkan dan tersusun sebagai penjabaran dari tahapan-tahapan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan-kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun berjalan.

Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025, baik kegiatan pembangunan fisik maupun non fisik menyatu dan diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan berdasarkan pada input, output, outcome, benefit dan impact sebagai bagian yang tak terpisahkan dari mekanisme perencanaan, skala prioritas serta anggaran yang tersedia.

Hal-hal penting yang perlu mendapatkan catatan maupun tindak lanjut dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan OPD :

1. Menentukan skala prioritas dengan melakukan kegiatan yang sifatnya penting dan pokok guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kinerja OPD;
2. Optimalisasi pelaksanaan tugas dengan memberdayakan aparat serta sumber daya yang ada;
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama baik internal maupun antar instansi untuk inventarisasi dan sinkronisasi dan meningkatkan hubungan kerjasama yang sinergis;
4. Kontribusi pelaku usaha di segala sektor ekonomi di Kota Balikpapan dalam membantu meningkatkan Investasi dan berpengaruh luas pada meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan berimbas pada makin meningkatnya kesejahteraan masyarakat pada umumnya agar selalu dikembangkan yang secara kongkrit dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan.

Balikpapan, 12 Juli 2024

Kepala DPMPSTSP Kota Balikpapan



**HASBULLAH HELMI**



WALI KOTA BALIKPAPAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 188.45-234/2024

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2025  
DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan efektivitas penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu membentuk Tim Penyusun Renja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusun Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan Tahun 2025 dan Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

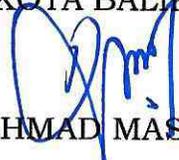
Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penyusun Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan Tahun 2025 dan Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan Tahun 2024 dengan susunan personel sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun Renja sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas:
1. Pengarah:
    - a. memberikan arahan, masukan dan saran berkaitan dengan kegiatan penyusunan Renja tahun 2025 dan perubahan Renja tahun 2024, baik dalam hal persiapan, mekanisme, penyelenggaraan, pelaksanaan, penyusunan, hasil akhir dokumen maupun legalisasi Renja tahun 2025 dan perubahan Renja tahun 2024; dan
    - b. mengoordinasikan, memfasilitasi dan mengawasi keseluruhan mekanisme dan tahapan kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Penyusun Renja tahun 2025 dan Perubahan Renja tahun 2024.
  2. Ketua:
    - a. mengoordinasikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tim Penyusun Renja;
    - b. membantu Pengarah dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada Tim Penyusun Renja;
    - c. memimpin penyusunan Renja berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan tahun 2021-2026; dan
    - d. menyampaikan laporan perkembangan dan hasil akhir penyusunan Renja kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan.
  3. Anggota:
    - a. mereviu hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu;
    - b. melakukan analisis kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan;
    - c. melakukan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan; dan
    - d. merumuskan tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan berdasarkan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan tahun 2021-2026.

- KETIGA : Tim Penyusun Renja sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum Kedua terhitung mulai bulan Januari 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal 5 Maret 2024

WALI KOTA BALIKPAPAN,



RAHMAD MAS'UD

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Balikpapan;
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BALIKPAPAN  
NOMOR 188.45-234/2024  
TENTANG  
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2025 DAN  
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN  
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024

SUSUNAN PERSONEL TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN  
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BALIKPAPAN TAHUN  
2025 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Pengarah	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Ketua	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3.	Anggota	1. Kabid Penanaman Modal 2. Kabid Perizinan Pemanfaatan Ruang 3. Kabid Perizinan Usaha 4. Kabid Pengaduan, Layanan Informasi dan Kebijakan 5. Kasubbag Umum 6. Hairani 7. Ratna Seri Dewi 8. Astri Rezeki 9. Ratna Juwita 10. Hendra 11. Andi Ida Maria Ulfa 12. Revi Citrawaty HS. 13. Dehen Nurwin Adam

WALI KOTA BALIKPAPAN,



RAHMAD MAS'UD

**PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BALIKPAPAN  
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						22.000.000.000,00							20.174.683.500,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						21.634.934.005,00							19.854.683.500,00		
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						21.634.934.005,00							19.854.683.500,00		
1.	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah</i>	81 Nilai			81 Nilai	15.449.350.920,00						81 Nilai	14.189.482.000,00		
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Nilai SAKIP</i>	-			77,80 Nilai	142.574.475,00			Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	3. Peningka tan derajat kesehatan masyarakat melalui pen ingkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudka n Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis K eunggulan Lokal	Pegawai DPMP TSP Kota Balikpapan	-	25.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				1 Dokumen	142.574.475,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	3. Peningka tan derajat kesehatan masyarakat melalui pen ingkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudka n Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis K eunggulan Lokal	Pegawai DPMP TSP Kota Balikpapan		25.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	9,807.133.965,00			Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	3. Peningka tan derajat kesehatan masyarakat melalui pen ingkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudka n Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis K eunggulan Lokal	Pegawai DPMP TSP Kota Balikpapan	-	9,986.482.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				60 Orang/bulan	9.807.133.965,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	3. Peningka tan derajat kesehatan masyarakat melalui pen ingkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudka n Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis K eunggulan Lokal	Pegawai DPMP TSP Kota Balikpapan		9,986.482.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			80,5 Nilai	1,573.415.336,00			Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	3. Peningka tan derajat kesehatan masyarakat melalui pen ingkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudka n Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis K eunggulan Lokal	Pegawai DPMP TSP Kota Balikpapan	-	1.398.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	60.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pegawai DPMPSTP Kota Balikpapan		70.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				13 Paket	84.885.925,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pegawai DPMPSTP Kota Balikpapan		350.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	575.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pegawai DPMPSTP Kota Balikpapan		408.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	100.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pegawai DPMPSTP Kota Balikpapan		150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	80.400.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pegawai DPMPSTP Kota Balikpapan		20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				55 Laporan	673.129.411,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pegawai DPMTSP Kota Balikpapan		400.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			80 Nilai	249.600.000,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pegawai DPMTSP Kota Balikpapan	-	200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	249.600.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pegawai DPMTSP Kota Balikpapan		200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	2.653.441.500,00			Melanjutka n Hilirisasi dan Mengan gembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkalkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	3. Peningka tan derajat kesehatan masyarakat melalui pen ingkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudka n Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis K eunggulan Lokal	Pegawai DPMTSP Kota Balikpapan	-	1.910.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	10.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Mengan gembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkalkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	3. Peningka tan derajat kesehatan masyarakat melalui pen ingkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudka n Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis K eunggulan Lokal	Pegawai DPMTSP Kota Balikpapan		10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	650.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Mengan gembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkalkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	3. Peningka tan derajat kesehatan masyarakat melalui pen ingkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudka n Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis K eunggulan Lokal	Pegawai DPMTSP Kota Balikpapan		900.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				3 Laporan	1,993.441,500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	3. Peningka tan derajat kesehatan masyarakat melalui pen ingkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudka n Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis K eunggulan Lokal	Pegawai DPMPSTP Kota Balikpapan		1.000.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			80 Nilai	1.023.185.644,00			Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	3. Peningka tan derajat kesehatan masyarakat melalui pen ingkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudka n Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis K eunggulan Lokal	Pegawai DPMPSTP Kota Balikpapan	-	670.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				24 Unit	822.701,564,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	3. Peningka tan derajat kesehatan masyarakat melalui pen ingkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudka n Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis K eunggulan Lokal	Pegawai DPMPSTP Kota Balikpapan		470.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	200,484,080,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pegawai DPMPSTP Kota Balikpapan		200,000,000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang Mendapat Manfaat Insentif Bidang Penanaman Modal	5 %			5 %	575,000,000,00						5 %	375,018,000,00	
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase dokumen peta potensi yang diterbitkan	-			20 %	575,000,000,00			Melanjutkan Hlirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pelaku Usaha	-	375,018,000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	200.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pelaku Usaha		175.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				1 Dokumen	375.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pelaku Usaha		200.018.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Presentase Minat Investasi dalam Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah	95 %			95 %	3.137.340.471,00						95 %	800.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase kenaikan jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal	-			5 %	3,137,340,471,00			Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	3. Peningka tan derajat kesehatan masyarakat melalui pen ingkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudka n Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis K eunggulan Lokal	Investor Kota Balikpapan	-	800,000,000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0002	Pejaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				6 Dokumen	3,137,340,471,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	3. Peningka tan derajat kesehatan masyarakat melalui pen ingkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudka n Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis K eunggulan Lokal	Investor Kota Balikpapan		800,000,000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Diterbitkan	70 %			70 %	1,699,994,614,00						70 %	2,214,337,500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelayanan Penerbitan perizinan dan non perizinan	-			11610 Dokumen	1.699.994.614,00			Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	3. Peningka tan derajat kesehatan masyarakat melalui pen ingkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudka n Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis K eunggulan Lokal	Pelaku Usaha	-	2.214.337.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				1500 Pelaku Usaha	1.203.260.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	3. Peningka tan derajat kesehatan masyarakat melalui pen ingkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudka n Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis K eunggulan Lokal	Pelaku Usaha		1.200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko														
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				10000 Pelaku Usaha	199.994.614,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	3. Peningka tan derajat kesehatan masyarakat melalui pen ingkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudka n Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis K eunggulan Lokal	Pelaku Usaha		614.337.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko														
			Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha				110 Kegiatan Usaha	296.740.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pelaku Usaha		400.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5.	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perusahaan (debottlenecking) yang difasilitasi Permasalahan Penanaman Modalnya	100 %			100 %	295.248.000,00						100 %	984.150.000,00	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyampaian LKPM	-			345 LKPM	295.248.000,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pelaku Usaha	-	984.150.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Pemasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				4 Kegiatan Usaha.	110,248,000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pelaku Usaha		5,000,000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				150 Pelaku Usaha	85,000,000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pelaku Usaha		450,000,000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal														
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha dan Pelaku Usaha ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				14 Kegiatan Usaha	100,000,000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pelaku Usaha		529,150,000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6.	2.18.06	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	-	-			-	478.000.000,00						-	1.291.696.000,00	
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	478.000.000,00			Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	3. Peningka tan derajat kesehatan masyarakat melalui pen ingkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya	Pelaku Usaha	-	1.291.696.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik														
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Ditolah, Dikej dan Dimanfaatkan				1 Dokumen	478.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kej/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	3. Peningka tan derajat kesehatan masyarakat melalui pen ingkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya	Pelaku Usaha		1.291.696.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	X	NON URUSAN						365.065.995,00							320.000.000,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						365.065.995,00							320.000.000,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	81 Nilai			81 Nilai	365.065.995,00						81 Nilai	320.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>JKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			80 Nilai	365.065.995,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-	-	320.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				8 Unit	365.065.995,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-		320.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			<b>J U M L A H</b>					<b>22.000.000.000,00</b>							<b>20.174.683.500,00</b>	